



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH**

DINAS PERIKANAN

TAHUN 2024



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO***

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA

- : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 20 Desember 2022



BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-
OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Subkoordinator Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Subkoordinator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Subkoordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perlengkapan	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Penyusunan Program	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Program	Anggota
	Subkoordinator Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Subkoordinator Perekonomian	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Alam	Anggota
	Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Bantuan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Subkoordinator Otonomi Daerah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Fasilitas Penganggaran	Anggota
	Subkoordinator Program dan Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Subkoordinator Fasilitas Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Persidangan dan Risalah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Analisis Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris 1
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris 2
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Kabag Tata Usaha RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perencanaan Dan Pelaporan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Keuangan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Subkoordinator PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Subkoordinator Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Subkoordinator Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Subkoordinator Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Subkoordinator Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Subkoordinator Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Identikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Identitas Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pendataan Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Kelahiran	Anggota
	Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Subkoordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Anggota
	Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Promosi	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Subkoordinator Metrologi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Subkoordinator Perizinan dan Data	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Aplikasi	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Subkoordinator Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Subkoordinator Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Subkoordinator Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Lalu Lintas	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Perumahan	Anggota
	Subkoordinator Kawasan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Genetik	Anggota
	Subkoordinator Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tanaman	Anggota
	Subkoordinator Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Subkoordinator Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Subkoordinator Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanshorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Non Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Perbibitan	Anggota
	Subkoordinator Kesmavet	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Hewan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pakan	Anggota
	Subkoordinator Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Subkoordinator Lahan dan Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Metode dan Infomasi	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Mutu Pembudiyaan Ikan	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Ketersediaan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Subkoordinator Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Subkoordinator Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Subkoordinator Kepangkatan	Anggota
	Subkoordinator Mutasi	Anggota
	Subkoordinator Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Subkoordinator Status ASN	Anggota
	Subkoordinator Informasi ASN	Anggota
	Subkoordinator Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bina Ideologi	Anggota
	Subkoordinator Bina Wasbang	Anggota
	Subkoordinator Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Subkoordinator HAL Dan Fasilitas Pemilu	Anggota
	Subkoordinator Fasilitas Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan	Anggota
	Subkoordinator Kesiapsiagaan	Anggota
	Subkoordinator Kedaruratan	Anggota
	Subkoordinator Logistik	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi	Anggota
	Subkoordinator Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguk	Ketua
	Sekretaris Camat Guguk	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguk	Anggota
31.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
32.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
33.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
34.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
35.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
36.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
38.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
39.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
40.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
42.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Renja ini merupakan pedoman pelaksanaan Urusan Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk satu tahun kedepan.

Penyusunan Renja ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja ini melibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari internal Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari para pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Dalam penyajian Renja ini juga masih terdapat kekurangan, saran dan perbaikan diharapkan untuk penyusunan perencanaan di masa mendatang. Demikianlah Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal Juli 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

MOHAMMAD SISWANTO, S.Pi, M.Si.
NIP. 19710808 199803 1 004

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
 I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan.....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan	18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
 III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan	45
3.3. Program dan Kegiatan	45
 IV. RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
V. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Sedangkan menurut Undang Undang 25 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Perangkat Daerah disusun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan Tahun ke-3 dan harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 s.d. 2026. Dengan mempedomani Visi dan Misi pembangunan daerah tahun 2021 s.d. 2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021 s.d. 2026. Rencana kerja Dinas

Perikanan disinkronkan dengan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja ditindak lanjuti dengan penyusunan Pra RKA Tahun 2024. Program dan kegiatan yang disusun disinkronkan dengan program Prioritas yang ada dalam RPJMD Tahun 2021 s.d. 2026 dengan memuat hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta pokok pokok pikiran DPRD. Dengan demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya Dinas Perikanan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan untuk Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021) Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021 Nomor 1); dan

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan ini adalah untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Dinas Perikanan yang mengacu kepada program Prioritas yang ada pada RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021 s.d 2026, Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 s.d 2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota serta pokok pikiran DPRD.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perikanan
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Perikanan ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
3. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efektif , efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perikanan

5. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, dengan Renstra OPD, dengan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan dengan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RKA OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat uraian tentang Undang –Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan Penganggaran OPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

II. BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU

Berisikan kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perikanan, analisis kinerja pelayan Dinas Perikanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Perikanan dan sebagainya.

III. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

IV. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

Berisikan ketentuan Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 meliputi beberapa hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2023 dapat diuraikan pada Tabel TC. 29

Tabel TC 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan sampai dengan Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : PERIKANAN

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	
3	25	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		85 %	80 %	100 %	100 %	100	0 %	180 %	
3	25	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	0 Dok	4 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	2 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	4 Dok	400.00%
3	25	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	2 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	2 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	9 Dok	3 Dok	3 Dok	100	0 Dok	12 Dok	133.33%
3	25	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100	0 Dok	8 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	275 %	275.00%
3	25	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	60 Orang	60 Orang	100	41 Orang/Bulan	101 Orang	841.67%
3	25	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	0 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	100.00%
3	25	XX	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	48 Dok	48 Dok	100	0 Dok	60 Dok	500.00%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	2 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Bulan	12 Bulan	10 Dok	10 Dok	100	0 Dok	10 Dok	83.33%
3	25	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	14 Dok	14 Dok	Dok	0 Dok	0	0 Dok	14 Dok	100.00%
3	25	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	2 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	1500.00%
3	25	XX	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 unit	1 Unit	Unit	0 Unit	0	Unit	0 Unit	0.00%
3	25	XX	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75 stel		Stel	0 Stel	0	Stel	0 Stel	0.00%
3	25	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 kali	1 Kali	100 Orang	100 Orang	100	0 Orang	100 Orang	10000.00%
3	25	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	1 Kali	Kali	0 Kali	0	Kali	0 Kali	0.00%
3	25	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	100	100 %	200 %	1666.67%
3	25	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	16.67%
3	25	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	200 Unit	200 Unit	100	1 Paket	200 Unit	1666.67%
3	25	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0 Bulan	0.00%
3	25	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	16.67%
3	25	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	16.67%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300.00%
3	25	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	0 Bulan	0	12 Laporan	12 Bulan	100.00%
3	25	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Dok	12 Dok	100	12 Laporan	12 Dok	100.00%
3	25	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20 %	18 %	100 %	100 %	100	100 %	218 %	1090.00%
3	25	XX	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Unit	Unit	0 Unit	0	Unit	0 Unit	0.00%
3	25	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	0 Paket	1 Paket	8.33%
3	25	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85 %	80 %	100 %	100 %	100	100 %	280 %	329.41%
3	25	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	4000 Surat	4000 Surat	100	12 Laporan	4000 Surat	33333.33%
3	25	XX	20	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	-1 Rekening -2160 m3 -10.200 kwh	-2 Rekening -1620 m3 -7650 kwh	100	12 Laporan	-2 Rekening -1620 m3 -7650 kwh	100.00%
3	25	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	38 Orang	38 Orang	100	0 Orang	38 Orang	316.67%
3	25	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	300.00%
3	25	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bulan	12 Bulan	60 Unit	60 Unit	100	47 Unit	107 Unit	891.67%
3	25	XX	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Bulan	12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	1 Unit	8.33%
3	25	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	10 Unit	10 Unit	100	55 Unit	65 Unit	541.67%
3	25	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	0 Paket	1 Paket	8.33%
3	25	XX	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5% %/Tahun	5 %/tahun	5 %/tahun	16.511 %/tahun	330	5 %/tahun	5 %/tahun	10000.00%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3900 Ton/Tahun	3412 ton/tahun	-1 Paket -2 Paket -2 Paket -1 Paket	-1 Paket -2 Paket -2 Paket -1 Paket	100	Paket 0 Paket Paket Paket	-1 Paket -2 Paket -2 Paket -1 Paket	100.00%
3	25	XX	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3900 Ton/Tahun	3412 ton/tahun	-5 Paket -1 Kegiatan -1 Kegiatan -6 Paket	-5 Paket -1 Kegiatan -1 Kegiatan -6 Paket	100	Paket 0 Kegiatan Kegiatan Paket	-5 Paket -1 Kegiatan -1 Kegiatan -6 Paket	100.00%
3	25	XX	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		81 %	80 %	%	0 %	0	%	80 %	98.77%
3	25	XX	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	81 %	80 %	%	0 %	0	50 orang	80 %	98.77%
3	25	XX	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	83 %	79 Kelompok	Kelompok	0 Kelompok	0	Kelompok	79 Kelompok	95.18%
3	25	XX	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	3 Ton/Tahun	3 %/tahun	3 %/tahun	-20.37 %/tahun	-679	3 %/tahun	3 %/tahun	100.00%
3	25	XX	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5 buah	buah	buah	0 buah	0	buah	0 buah	0.00%
3	25	XX	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Insentif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5 buah	buah	buah	0 buah		buah	0 buah	0.00%
3	25	XX	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		81 %	77 ;	3 %/tahun	3 %/tahun	100	3 %/tahun	3 %/tahun	3.70%
3	25	XX	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	559 Kelompok	539 Kelompok	Kelompok	0 Kelompok	0	75 Kelompok	75 Kelompok	13.42%
3	25	XX	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	559 Kelompok	539 Kelompok	-550 Kelompok -1 Paket -1 Paket -12 Bulan -1 Paket -12 Bulan -12 Bulan	-550 Kelompok -1 Paket -1 Paket -12 Bulan -1 Paket -12 Bulan -12 Bulan	100	-100 Kelompok -144 Kelompok	-794 Kelompok -1 Paket -1 Paket -12 Bulan -1 Paket -12 Bulan -12 Bulan	103.00%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	81 %	77 %	9 Paket	9 Paket	100	0 Paket	9 Paket	11.11%
3	25	XX	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	559 Kelompok	539 Kelompok	90 Kelompok	90 Kelompok	100	35 Kelompok	664 Kelompok	118.78%
3	25	XX	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5 buah	5 Buah	Buah	0 Buah	0	Buah	0 Buah	0.00%
3	25	XX	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 buah	5 Buah	Buah	0 Buah	0	Buah	0 Buah	0.00%
3	25	XX	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 buah	0 0	0	0 0		0	0 0	0.00%
3	25	XX	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		47218 Ton/Tahun	44508 ton/tahun	45843 ton/tahun	35898.73 ton/tahun	78	ton/tahun	35898.73 ton/tahun	76.03%
3	25	XX	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	469 Juta ekor benih	450 juta ekor benih	juta ekor benih	0 juta ekor benih	0	juta ekor benih	0 juta ekor benih	0.00%
3	25	XX	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47218 Ton/Tahun	44508 ton/tahun	6 Paket	6 Paket	100	0 Paket	6 Paket	0.01%
3	25	XX	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47218 Ton/Tahun	44508 ton/tahun	10 Paket	10 Paket	100	0 Paket	10 Paket	0.02%
3	25	XX	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	15 %	20 %	1 Paket	1 Paket	100	0 Paket	1 Paket	6.67%
3	25	XX	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	47218 Ton/Tahun	44508 ton/tahun	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	12 Bulan	0.03%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	20 Ha	5 Ha	20 Ha	20 Ha	100	0 Ekor	20 Ha	100.00%
3	25	XX	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Ha	5 Ha	Ha	0 Ha	0	0 Ha	0 Ha	0.00%
3	25	XX	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pengawasan	5 %/Tahun	%/tahun	%/tahun	0 %/tahun	0	%/tahun	0 %/tahun	0.00%
3	25	XX	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		17 Kelompok	Kelompok	Kelompok	0 Kelompok		Kelompok	0 Kelompok	0.00%
3	25	XX	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	17 Kelompok	Kelompok	Kelompok	0 Kelompok		Kelompok	0 Kelompok	0.00%
3	25	XX	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota.	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	17 Kelompok	Kelompok	Kelompok	0 Kelompok		Kelompok	0 Kelompok	0.00%
3	25	XX	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	40 dan 5 Kg/Kapita/Tahun dan %/Tahun	39 Kg/Kapita/Tahun	38.5 Kg/Kapita/Tahun	39.9 Kg/Kapita/Tahun	104	40 Kg/Kapita/Tahun	79.9 Kg/Kapita/Tahun	#VALUE!
3	25	XX	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		375 Ton/Tahun	355 ton/tahun	38.50 Kg/Kapita/Tahun	39.9 Kg/Kapita/Tahun	104	40 Kg/Kapita/Tahun	80 Kg/Kapita/Tahun	21.31%
3	25	XX	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	375 Ton/Tahun	355 ton/tahun	39.00 Kg/Kapita/Tahun	39.9 Kg/Kapita/Tahun	102	5 Dokumen	45 Kg/Kapita/Tahun	11.97%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/ d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		375 ton/tahun	355 ton/tahun	355 ton/tahun	344.681 ton/tahun	97	ton/tahun	344.681 ton/tahun	91.91%
3	25	XX	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penarapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	375 ton/tahun	355 ton/tahun	365 ton/tahun	344.681 ton/tahun	94	ton/tahun	700 ton/tahun	186.54%
3	25	XX	06	2.03		Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Penglahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		40 kg/kapita/tahun	39 Kg/Kapita/Tahun	38.5 Kg/Kapita/Tahun	39.9 Kg/Kapita/Tahun	102	Kg/Kapita/Tahun	79 Kg/Kapita/Tahun	197.85%
3	25	XX	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	40 kg/kapita/ tahun	39 Kg/Kapita/ Tahun	Kg/ Kapita/ Tahun	0 Kg/ Kapita/ Tahun	0	Kg/ Kapita/ Tahun	0 Kg/ Kapita/ Tahun	0.00%
3	25	XX	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	40 kg/kapita/ tahun	39 Kg/Kapita/ Tahun	38.5 Kg/ Kapita/ Tahun	39.9 Kg/ Kapita/ Tahun	104	0 Kg/ Kapita/ Tahun	79 Kg/ Kapita/ Tahun	197.85%

Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya perbedaan indikator kinerja dari Tahun 2021. Hal ini didasarkan oleh adanya penetapan indikator Sub Kegiatan yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang ditetapkan pada Bulan Desember Tahun 2021.

Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, seluruh indikator sub kegiatan sudah mencapai target dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Program Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja yakni persentase peningkatan produksi tangkap juga sudah mencapai target. Dari target 5% dengan realisasi 16.511% atau dengan tingkat realisasi mencapai 330%. Hal ini disebabkan oleh adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dengan memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan bantuan perahu, mesin perahu dan alat tangkap untuk kelompok nelayan (KUB). Selain itu Dinas Perikanan juga melakukan pengembangan Lubuk Larangan, dan melakukan Restocking di Perairan Umum.

Pada Program Perikanan Budidaya, terdapat satu indikator kegiatan yang tidak mencapai target yakni kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan dengan target 45.843 ton/tahun dan realisasi 35.898,73 ton/tahun (78%). Selain itu, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kerja yakni persentase peningkatan produksi budidaya juga belum mencapai target. Dari target yang ditetapkan 3%, realisasi anjlok hingga angka minus yakni -20,37% dikarenakan terjadinya penurunan produksi budidaya yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan air tidak sepanjang musim pada kolam pokdakan karena banyak kolam masyarakat yang sistem tadah hujan, sistem budidaya yang masih tradisional, mahalnya harga pakan dan juga musibah banjir.

Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan,

indikator kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan indikator Tingkat Konsumsi makan ikan sudah mencapai target yakni 38,5 kg/kapita/tahun dengan realisasi 39,9 kg/kapita/tahun (102%). Hal ini didukung oleh adanya kegiatan membuat diservikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak otak ikan. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat radio, Promosi lewat Baliho, Kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) mulai dari tingkat Nagari dan lomba-lomba masak serba ikan. Sementara itu untuk kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan indikator jumlah produksi pengolahan perikanan belum mencapai target yakni 355 ton/tahun dengan realisasi 344,681 ton/tahun (94%). Ini disebabkan karena pengaruh Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga daya beli masyarakat pun cenderung menurun. Untuk meningkatkan promosi produk hasil olahan ikan, Dinas Perikanan sudah berupaya memberikan bantuan berupa pembangunan kios mini untuk pemasaran ikan dan produk hasil perikanan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menganalisis Kinerja Pelayanan OPD mengacu pada Indikator Kinerja Utama serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas perikanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan, dengan Tabel TC-30 sebagai berikut :

Tabel TC.30
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB			3.72	3.78	3.83	3.89	3.66	3.67	3.78	3.83	3.89	
			Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	-1.7	16.51	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	
			Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	1.29	-20.4	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	
			Persentase Peningkatan Pengawasan	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	0	0	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	
			Tingkat Konsumsi Makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	38.5	39	39.5	40	3.26	1.68	39	39.5	40	

Tabel TC.30
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB			3.72	3.78	3.83	3.89	3.66	3.67	3.78	3.83	3.89	
			Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	-1.7	16.51	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	
			Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	1.29	-20.4	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	
			Persentase Peningkatan Pengawasan	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	0	0	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	
			Tingkat Konsumsi Makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	38.5	39	39.5	40	3.26	1.68	39	39.5	40	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

a) Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menganalisis Kinerja Pelayanan OPD mengacu pada Indikator Kinerja Utama serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilaksanakan Dinas Perikanan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan PD :

1. Memanfaatkan sosial media seperti *Whatsapp group* sebagai media penghubung Dinas Perikanan dengan Kelompok Perikanan. Dalam wadah ini, kelompok perikanan dapat menerima informasi tentang kegiatan Dinas serta dapat pula melaporkan atau membuat pengaduan yang berkaitan dengan masalah perikanan di lapangan.
2. Memanfaatkan website serta platform Instagram atau Facebook dalam hal promosi produk perikanan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan daya tarik bagi penjual dan pembeli yang akan berdampak pada kesejahteraan kelompok perikanan.
3. Membuat leaflet, poster dan banner yang berisikan informasi penting tentang perikanan dan kegiatan Dinas Perikanan.

b) Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan menghadapi permasalahan - permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Identifikasi Permasalahan Dinas Perikanan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Produksi dan produktivitas perikanan	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang unggul	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya jumlah luas lahan baru budidaya perikanan (skema investasi) Masih rendahnya jumlah kolam baru yang dibangun Masih sedikitnya jumlah bangsal pembenihan yang dibangun Masih rendahnya jumlah jenis ikan lokal yang dibudidayakan Masih sedikitnya jumlah obat-obatan ikan Masih rendahnya jumlah demplot peningkatan kualitas air Masih rendahnya jumlah pengujian sampel ikan Masih rendahnya jumlah pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB dan CPIB Masih rendahnya jumlah benih, calon induk dan pakan yang didistribusikan Masih sedikitnya jumlah pembinaan teknis yang dilakukan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Rendahnya Jumlah kelompok Perikanan yang Aktif	1. Masih sedikitnya jumlah pelatihan teknis 2. Masih sedikitnya jumlah bimbingan Teknis 3. Masih sedikitnya jumlah temu usaha perikanan 4. Masih rendahnya jumlah rekomendasi usaha perizinan 5. Masih rendahnya jumlah kelompok yang teregistrasi 6. Masih rendahnya jumlah kelompok yang dinilai
		3. Belum Optimalnya Produksi Tangkap dan Konsumsi Ikan	1. Masih rendahnya jumlah SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) 2. Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana perikanan 3. Masih rendahnya jumlah asuransi pembudidaya ikan 4. Masih rendahnya jumlah fasilitasi perlindungan usaha perikanan 5. Masih rendahnya jumlah sosialisasi gemarikan 6. Masih rendahnya jumlah angka konsumsi makan ikan 7. Masih rendahnya jumlah promosi penguatan daya saing

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul sesuai standar SNI
2. Penerapan CBIB dan CPIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit ikan
3. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manfaat konsumsi ikan
4. Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar
5. Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah budidaya
6. Sebagian kelas kelompok perikanan merupakan kelas kelompok pemula
7. Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara yang sederhana
8. Masih rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan
9. Adanya alih fungsi lahan dari lahan perikanan menjadi lahan pertanian karena terbatasnya sumber daya air
10. Rendahnya pengembangan luas lahan budidaya (Ekstensifikasi)
11. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan karakteristik daerah
12. Kurangnya modal usaha masyarakat perikanan
13. Biaya produksi usaha perikanan yang relatif tinggi
14. Masih rendahnya investasi, kerjasama dan kemitraan sektor perikanan

Faktor Pendorong

1. Pemberian bantuan benih dan calon induk ikan unggul sesuai standar SNI
2. Sosialisasi dan sertifikasi CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan
3. Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)

4. Lomba Menu Kreasi berbahan dasar ikan
 5. Pembentukan Forum FORIKAN
 6. Fasilitasi terhadap pengolahan ikan untuk memperoleh perizinan P-IRT
 7. Pendampingan pada kelas kelompok pemula
 8. Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi kelompok
 9. Sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit ikan
 10. Bantuan *excavator* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perluasan lahan perikanan
- c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Permasalahan dan hambatan yang terjadi di Dinas perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dapat berpengaruh terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yang mana Dinas perikanan sendiri menjalankan Misi ke 2 Kepala Daerah yakni : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional. Pada sasaran meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perikanan berperan dalam pencapaian indikator persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dalam harga berlaku.

Sebagai contoh, salah satu permasalahan Dinas Perikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yaitu Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang unggul. Hal ini akan berdampak pada jumlah produksi perikanan yang rendah. Sementara itu, produksi budidaya adalah salah satu elemen yang menjadi dasar perhitungan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada perhitungan kontribusi perikanan terhadap PDRB. Semakin tinggi

produksi perikanan, maka semakin tinggi pula angka kontribusi perikanan terhadap PDRB.

d) Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai target Capaian IKU OPD, Dinas Perikanan menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

1) Tantangan

- a. Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul sesuai standar SNI
- b. Penerapan CBIB dan CPIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit ikan
- c. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manfaat konsumsi ikan
- d. Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar
- e. Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah budidayaSebagian kelas kelompok perikanan merupakan kelas kelompok pemula
- f. Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara yang sederhana
- g. Masih rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan
- h. Adanya alih fungsi lahan dari lahan perikanan menjadi lahan pertanian karena terbatasnya sumber daya air
- i. Rendahnya pengembangan luas lahan budidaya (Ekstensifikasi)
- j. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan karakteristik daerah

- k. Kurangnya modal usaha masyarakat perikanan
- l. Biaya produksi usaha perikanan yang relatif tinggi
- m. Masih rendahnya investasi, kerjasama dan kemitraan sektor perikanan

2) Peluang

- a. Pemberian bantuan benih dan calon induk ikan unggul sesuai standar SNI
 - b. Sosialisasi dan sertifikasi CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan
 - c. Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)
 - d. Lomba Menu Kreasi berbahan dasar ikan
 - e. Pembentukan Forum FORIKAN
 - f. Fasilitasi terhadap pengolahan ikan untuk memperoleh perizinan P-IRT
 - g. Pendampingan pada kelas kelompok pemula
 - h. Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi kelompok
 - i. Sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit ikan
 - j. Bantuan *excavator* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perluasan lahan perikanan
- e) Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya ikan baik berupa alih fungsi lahan potensial budidaya
2. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih

- ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
 4. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberian jaminan sosial bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
 5. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan
 6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat
 7. Meningkatnya tuntutan akan produk perikanan yang aman bagi kesehatan manusia
 8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan sumber daya perikanan
 9. Masih rendahnya jumlah kelompok perikanan yang aktif dan cakupan bina kelompok

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat yang berhasil dikumpulkan dari Masyarakat, stake holder dan pemerintah sendiri. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap OPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap OPD dalam menyiapkan rancangan Renja OPD. Rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif

untuk tahun yang direncanakan.

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perikanan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses *bottom up* melalui mekanisme Musrenbang Nagari dan Kecamatan yang disesuaikan dengan Renstra Dinas Perikanan dan RPJMD Kab. Lima Puluh Kota, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Untuk melihat rincian rancangan awal RKPD Dinas Perikanan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel TC.31 berikut

Tabel TC.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPД tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perikanan

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100 %	5,655,786,558	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100 %	3,581,014,366	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		85%	145,533,201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	21,218,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	9,942,755	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	9,631,911	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	8,949,752	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	9,053,721	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	63,672,035	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	23,065,027	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		100 %	3,401,845,447	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		12 bulan	3,260,766,466	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,344,944,076	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	3,260,766,466	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	7,585,435	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	6,792,943	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	12,181,254	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 bulan	9,904,562	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Dok	9,123,740	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	11,313,438	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		20%	215,468,790	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		-	-	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	75 stel	79,567,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perikanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Kali	119,351,250	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perikanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kali	16,550,040	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		12 Bulan	62,484,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		12 Bulan	93,452,900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	1,271,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	23,342,700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 paket	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 paket	2,000,100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 paket	11,280,100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 paket	3,840,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	7,810,600	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 paket	5,985,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	7,810,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 paket	45,734,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perikanan		20 %	520,853,550	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perikanan		0	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	449,242,800	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Mebel	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 bulan	71,610,750	Pengadaan Mebel	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 bulan	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		85 %	684,306,310	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		85 %	62,400,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	4,774,050	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	47,103,960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	49,460,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	632,428,300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	10,940,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		100%	625,294,460	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit 47 Unit	164,395,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	417,930,946	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	162,445,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Perikanan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 bulan	53,045,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Perikanan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	39,698,878	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	1,950,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	114,619,636	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5 %/ tahun	1,129,380,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	-	250,000,000	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		4.100 ton/ Tahun	1,042,406,888	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		-	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	4.100 ton/ Tahun	195,589,527	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	-	-	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	4.100 ton/ Tahun	530,331,368	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-	-	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4.100 ton/ Tahun	316,485,993	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-	-	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		83%	86,973,112	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		83%	250,000,000	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	83%	25,809,045	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	81 Orang	250,000,000	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	85 Kelompok	61,164,068	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	3 %/ tahun	4,437,350,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	3 %/ tahun	1,155,622,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		5 buah	31,827,000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		-	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Insentif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5 buah	31,827,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Insentif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-	-	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan		83 %	1,248,661,536	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan		83%	1,155,622,500	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	562 Kelompok	167,534,262	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	574 Kelompok	665,000,000	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	562 Kelompok	135,945,168	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	-	-	
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	83%	391,207,936	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	562 Kelompok	553,974,170	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	574 Kelompok	490,622,500	
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		5 buah	89,925,925	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		-	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 buah	59,675,625	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-	-	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 buah	30,250,300	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan		48.635 ton/tahun	3,066,935,539	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan		-	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	470 juta ekor benih	473,447,344	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.635 ton/tahun	642,045,600	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	Penjaminan Ketersediaan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.635 ton/tahun	279,069,817	Penjaminan Ketersediaan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	20 %	128,658,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	-	-	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	48.635 ton/tahun	36,622,268	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	-	-	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	20 Ha	1,405,290,400	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	-	-	
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Ha	101,802,110	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	-	-	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan	5 % / tahun	82,050,000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan	-	-	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		19 kelompok	82,050,000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	19 kelompok	36,922,500	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	-	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota.	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	19 kelompok	45,127,500	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota.	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	-	-	-
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	40,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	732,260,000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	-	-	-
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan		385 Ton/tahun	172,016,441	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan		-	-	-
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	385Ton/tahun	172,016,441	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	-	-	-
									-	-	-
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan		385 Ton/tahun	79,879,000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan		-	-	-
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penarapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan	385 Ton/tahun	79,879,000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penarapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan	-	-	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		40,5 Kg/ Kapita/ Tahun	480,364,559	Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		-	-	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,5 Kg/ Kapita/ Tahun	218,025,559	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40,5 Kg/ Kapita/ Tahun	262,339,000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	-	-	
					12,036,826,559					4,986,636,866	

Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan ini terletak pada perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya yaitu untuk bidang pendidikan, maka seluruh kegiatan yang dijalankan PD harus menunjang bidang pendidikan. Dinas Perikanan dalam bidang pendidikan dapat memberikan pembinaan, sosialisasi atau bimbingan teknis tentang kegiatan produksi perikanan kepada masyarakat khususnya kelompok perikanan.

Untuk indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ada yang berbeda antara rancangan awal RKP dnegan hasil analisis kebutuhan. Pada rancangan awal RKPD penetapan indikator Sub Kegiatan sudah didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas perikanan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada

pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten serta dari Reses DPRD. Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Perikanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya. Aspirasi masyarakat ini sekaligus juga menjadi solusi untuk menyelesaikan isu-isu penting dan penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2024 melalui aplikasi SIPD, aparatur Nagari dan Kecamatan sudah mengusulkan dan menginput usulan kegiatan tahun 2024 yang berasal dari hasil Musrenbang Nagari dan Kecamatan. Begitupun usulan kegiatan tahun 2024 yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga sudah diinput langsung oleh aparatur di Sekretariat DPRD. Usulan-usulan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Perikanan melalui hasil verifikasi oleh bidang terkait. Adapun kategori usulan yang diterima adalah usulan yang berasal dari kelompok perikanan yang sudah terdaftar, kelompok perikanan yang tidak/belum menerima bantuan selama 2 tahun berturut-turut, dan usulan harus sesuai dengan Rencana Kerja yang sudah disusun oleh Dinas Perikanan pada Tahun 2024.

Usulan program dan kegiatan tahun 2023 yang ditujukan ke Dinas Perikanan dapat dilihat pada Tabel TC.32 berikut :

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
1	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan Nagari Mungka	Kec. Mungka	Jumlah Pakan dan Benih	1000 m2	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
2	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan Nagari Koto Lamo	Kec. Kapur IX	Jumlah Pakan dan Benih	1000 m2	
3	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan garing Nagari Muaro Paiti	Kec. Kapur IX	Jumlah Pakan dan Benih Ikan Garing	1000 m2	
4	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan garing Nagari Sialang	Kec. Kapur IX	Jumlah Pakan dan Benih Ikan Garing	1000 m2	
5	Bantuan perahu dan sarana alat tangkap berupa Perahu Fiber Mesin Tempel Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kec. Pangkalan Koto Baru	Jumlah perahu dan sarana alat tangkap berupa Perahu Fiber Mesin Tempel	4 Unit	
6	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN GURAMI Jorong Taratak Nagari Kubang	Kec. Guguak	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN GURAMI	1000 m2	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
7	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN GURAMI Jorong Siamang Bunyi Nagari Kubang	Kec. Guguak	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN GURAMI	1000 m2	
8	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan garing Jopang Manganti Nagari Mungka	Kec. Mungka	Jumlah Pakan dan Benih Ikan Garing	2000 m2	
9	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan garing Jopang Manganti Nagari Mungka	Kec. Mungka	Jumlah Pakan dan Benih Ikan Garing	1000 m2	
10	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan Baung Nagari Koto Bangun	Kec. Kapur IX	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan Baung Nagari Koto Bangun	1000 m2	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
11	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan Baung Nagari Taeh Bukik	Kec. Payakumbuh	Jumlah Pakan dan Benih ikan Baung	1000 m2	
12	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA Nagari Durian Tinggi	Kec. Kapur IX	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA	1000 Ekor	
13	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA Nagari Durian Tinggi	Kec. Kapur IX	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA	1000 Ekor	
14	Bantuan sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI Nagari Andaleh	Kec. Luak	Jumlah sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI	100 kg	
15	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN LELE Nagari Bukik Sikumpa	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN LELE	100 kg	
16	Rehab Kolam Pokdakan Nagari Bukik Sikumpa	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah kolam yang direhab	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
17	Rehab Kolam Pokdakan Nagari Balai Panjang	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah kolam yang direhab	1 Paket	
18	Pembangunan Sumur Bor Nagari Andaleh	Kec. Luak	Jumlah Sumur Bor yang dibangun	1 Paket	
19	Bantuan sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI Nagari Kubang	Kec. Guguak	Jumlah sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI	1 Paket	
20	Bantuan sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI Nagari Simpang Sugiaran	Kec. Guguak	Jumlah sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI	1 Paket	
21	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA Nagari Durian Tinggi	Kec. Kapur IX	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA	5000 Bibit	
22	Bimtek Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB) Kecamatan Guguak dan Kecamatan Mungka	Kec. Mungka	Jumlah Bimtek Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB)	35 Orang	
23	Temu Usaha Kemitraan Nagari Mungka	Kec. Mungka	Jumlah Temu Usaha Kemitraan	40 Orang	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
24	Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan Nagari Mungka	Kec. Mungka	Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan Nagari Mungka	40 Orang	
25	Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan Nagari Solok Bio-bio	Kec. Harau	Jumlah Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan	40 Orang	
26	Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan Nagari Lareh Sago Halaban	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan	2 Paket	
27	Revitalisasi Kolam Rakyat (sarana kolam, benih dan pakan) Nagari Taeh Baruah	Kec. Payakumb uh	Jumlah Revitalisasi Kolam Rakyat (sarana kolam, benih dan pakan)	1 Paket	
28	Jalan Produksi Perikanan Nagari Tanjuang Balik	Kec. Pangkalan Koto Baru	Panjang Jalan Produksi Perikanan	1 Km	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatannelayan.
2. Mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsimasyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhanbahanbakuindustri,peningkatankualitasmutuprodukdanilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansiterkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan danperikanan.

Dari investigasi Arah dan kebijakan KKP, ditemui berbagai permasalahan yang dihadapi di bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini khususnya di Provinsi Sumater Barat. Hal tersebut tertuang didalam sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perikanan Provinsi Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas induk yang ada di Sumatera Barat, baik yang ada di semua Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota maupun Unit Pembenihan Rakyat, sehingga produktifitas optimal dan tingkat keekonomian yang diterima produsen masih jauh dari yang diharapkan.
2. Keterbatasan armada dan alat tangkap
3. Kurangnya enterpreneurship khususnya di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat perkembangan jumlah areal budidaya, jumlah armada tangkap, jumlah unit pengolahan dan lain-lain
4. Terbatasnya sarana pengawasan Sumber Daya Ikan
5. Kompetisi daerah tetangga seperti Riau, Jambi di bidang perikanan budidaya perlu dianalisa baik dalam hal dukungan Pemerintah Daerahnya,
6. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi Sumatera Barat.

Adapun yang menjadi fokus kegiatan Dinas Perikanan ditinjau dari permasalahan yang dihadapi di bidang kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Pengoptimalan penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
2. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
3. Peningkatan jumlah kelompok perikanan yang aktif dan cakupan bina kelompok

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta sasaran target kinerja Renstra adalah :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Renstra Dinas Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan	1) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Ikan konsumsi dari Budidaya
		Produksi benih ikan (ekor)
		Produksi ikan hias (ekor)
		Produksi Produk Unggulan Daerah/ Ikan Gurami Sago (ekor)
		Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/Ha)
		Cakupan Bina Kelompok Perikanan Budidaya (%)
	2) Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi tangkap (ton)
		Cakupan Bina Kelompok Perikanan tangkap (%)
	3) Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
		Produksi hasil olahan perikanan (ton)

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan adalah Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dinas Perikanan dengan urusan Kelautan dan Perikanan menjalankan MISI 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional. Pada sasaran meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perikanan berperan dalam pencapaian indikator persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dalam harga berlaku. Dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Daerah menetapkan Program Unggulan Pembangunan Daerah dan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah. Dinas Perikanan menjalankan program unggulan : Pembukaan lahan baru perikanan seluas 1.000 Ha dan menghasilkan 20 juta bibit ikan perbulan. Sementara itu untuk program prioritas, penentuannya didasarkan oleh permasalahan yang terjadi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

T-B.36
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa data capaian Kinerja tahun 2021 atau 2022)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	-5
	Bidang urusan Kelautan dan Perikanan			
	1. Persentase Peningkatan Konsumsi Makan Ikan	Melampaui (>)		Kesadaran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tinggi mengenai pentingnya makan ikan dan tujuan dari mengkonsumsi ikan Gencar melakukan kegiatan mempromosikan makan ikan melalui gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan (gemarikan)
	2. Persentase Produksi Tangkap	Belum Tercapai(<)	Kurangnya hasil tangkapan karena kegiatan penangkapan Kabupaten Lima Puluh Kota hanya berpusat di waduk sementara saat terjadi kemarau panjang menyebabkan turunnya debit dan permukaan air sehingga ikan yang ada di waduk beruaya ke perairan lain dan menurunkan tingkat densitas ikan dalam waduk. Sarana dan prasaran penangkapan yang dimiliki oleh nelayan penangkapan masih belum memadai sehingga kegiatan penangkapan ikan belum dapat dilakukan secara optimal.	Meningkatkan serta mengupgrade sarana dan prasarana nelayan perikanan tangkap menjadi lebih memadai melalui pemberian bantuan.
	3. Persentase Peningkatan Cakupan Bina Kelompok	Belum Tercapai(<)	Kemampuan penyuluh masih kurang optimal dalam pembinaan kelompok	Perlunya penambahan tenaga penyuluh yang memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan
			Kurangnya tenaga penyuluh untuk pembinaan kelompok di Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatkan strategi dalam mengelola pembinaan kelompok perikanan bekerjasama dengan Pemangku Adat dan Tokoh Nagari setempat
			Kelompok banyak yang kurang aktif	Melalui Perbub Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan dapat dilakukan renovasi ulang kelompok dengan cara melakukan pembaharuan, pembinaan serta evaluasi kelompok di masing-masing nagari setiap tahun.
	4. Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	Belum Tercapai(<)	Terjadinya lockdown saat pandemi covid-19 menyebabkan banyak kolam yang tidak termanfaatkan oleh pembudidaya sehingga produksi menurun	Memanfaatkan kolam-kolam yang terbengkalai dan meningkatkan kerjasama BBI dan pembudidaya ikan dengan memberikan bantuan benih Meningkatkan sosialisasi kepada kelompok pembudidaya ikan tentang kerjasama dengan pemasok pakan ikan
	5. Persentase Peningkatan Produktifitas Perikanan	Belum Tercapai(<)	Menurunnya input dari kegiatan pembudidayaan saat lockdown karena pandemi covid-19	Memaksimalkan pemanfaatan lahan budidaya yang terbengkalai serta memperluas lahan usaha budidaya ikan dengan sistem mina padi melalui kerja sama pembudidaya dengan BBI sebagai pemasok benih

Dari tabel T-B.36 dapat dilihat bahwa bidang urusan Kelautan dan Perikanan indikator kinerja yang melampaui interpretasi hanyalah persentase peningkatan konsumsi makan ikan, indikator persentase produksi tangkap belum tercapai disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana tangkap yang dimiliki oleh nelayan, persentase peningkatan cakupan bina kelompok belum tercapai disebabkan karena kurangnya tenaga penyuluh yang kompeten dibidangnya, persentase peningkatan produksi budidaya dan persentase peningkatan produktifitas perikanan juga belum tercapai disebabkan karena masih banyaknya kolam-kolam yang terbengkalai yang belum dimanfaatkan dan belum maksimalnya pemanfaatan lahan-lahan budidaya lainnya.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi

Dinas Perikanan melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar Rp. 4,986,636,866. Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan 3 Program . Adapun rincian rencana kerja setiap program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Terdiri dari 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan)
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan)
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan)

Anggaran 2 Program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikanan Budidaya seluruhnya berasal dari DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang

Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya yaitu untuk bidang pendidikan dengan pagu sebesar RP. 1.405.622.636.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Tahun 2024 serta prakiraan maju untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel TC.33 berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						4.986.636.866,00							9.099.054.277,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.986.636.866,00							9.099.054.277,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						4.986.636.866,00							9.099.054.277,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.581.014.366,00						-	6.096.155.236,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	177.820.540,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.854.540,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.474.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.084.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.228.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.359.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		79.882.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.937.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	-			100 %	3.260.766.466,00			-	-	-	-	3.514.632.050,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3.260.766.466,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.445.292.398,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.516.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.522.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.282.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.426.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.397.452,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.194.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	221.932.854,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		81.954.525,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		122.931.788,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.046.541,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	-			12 Bulan	93.452.900,00			-	-	Administrasi Perkantoran	-	101.159.218,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1.271.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		8.591.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	23.342.700,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		6.861.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	2.000.100,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	11.280.100,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		61.190.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	3.840.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		8.044.918,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	5.985.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		16.471.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	45.734.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	567.926.173,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		494.167.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.759.073,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	62.400.000,00			-	-	Administrasi kantor	-	749.106.251,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi kantor		4.917.272,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	49.460.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi kantor		48.517.079,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	10.940.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi kantor		695.671.900,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			55 Unit 47 Unit	164.395.000,00			-	-	Kendaraan Dinas, Alat berat dan Gedung Kantor	-	763.578.150,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	162.445.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas, Alat berat dan Gedung Kantor		524.334.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas, Alat berat dan Gedung Kantor		54.636.350,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	1.950.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas, Alat berat dan Gedung Kantor		40.806.100,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas, Alat berat dan Gedung Kantor		143.801.300,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	250.000.000,00						-	1.519.624.174,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.007.563.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.341.719,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		516.241.309,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		325.980.572,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Sumber Daya Ikan Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	-			12 Dokumen 11 Paket	250.000.000,00			-	-	Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan /Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama	-	512.060.574,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				81 Orang	250.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan /Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama		32.380.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				0 Kelompok	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan /Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama		76.736.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				0 Unit Usaha	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan /Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama		402.944.174,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	1.155.622.500,00						-	1.483.274.867,00	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	33.052.059,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				0 Rekomendasi	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.052.059,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				574 Kelompok	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.023.523,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				574 Kelompok	490.622.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.593.395,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Rekomend asi	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Rekomend asi	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	642.045.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		642.045.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				0 Ha	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				0 Pelaku Usaha	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H							4.986.636.866,00							9.099.054.277,00	

Rencana Kerja Dinas Perikanan 2024 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perikanan tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Untuk target Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah/IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2023	2024	
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3,78	3,83	IKU KD/ IKU OPD

Perhitungan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan data berupa Produksi Budidaya, Tangkap dan Benih. Jika Produksi Perikanan tersebut tinggi maka tinggi pula kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB.

Secara umum ada 4 indikator target Indikator Kinerja pada Dinas Perikanan. Penyusunan rencana target kinerja pelayanan perangkat daerah urusan penunjang urusan pemerintahan mengacu kepada Renstra Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Adapun Target Indikator Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024

No	Sasaran	Satuan	Target	
			2023	2024
1	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%	5	5
2	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	%	3	3
3	Persentase Peningkatan Pengawasan	%	5	5
4	Tingkat Konsumsi Makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Kg/kapita/Tahun dan %	40,5 dan 5	41 dan 5

Rencana Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3. Rencana Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024
1	Produksi perikanan	Ton	48.635
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	39.5
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	83
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	4.100
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	Ton	52.735

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Nagari, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat Kabupaten sampai pada Musrenbang Tingkat Provinsi dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja Dinas Perikanan ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Sementara itu Renja 2024 yang disusun juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan 2021 sampai dengan 2026.

Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian Target Kinerja. Program dan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran.

Dalam hal pelaksanaan program kegiatan ketersediaan anggaran merupakan hal yang paling penting dalam pencapaian target kinerja. Selain itu Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perikanan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perikanan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perikanan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perikanan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perikanan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi

pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2024, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perikanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal Juli 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

MOHAMMAD SISWANTO, S.Pi, M.Si.
NIP. 19710808 199803 1 004